

A B S T R A K

Nama : Muhammad Syahrul Ramadhan
N I M : 2110611329
Judul Skripsi : Implementasi Penerbitan Sertipikat Elektronik Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
Kata Kunci : Sertipikat Tanah Elektronik
Halaman : i-xii + 88 halaman

Isi Abstrak :

Sertipikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menginisiasi peralihan sertipikat hak atas tanah dari bentuk fisik analog menjadi bentuk elektronik. Secara normatif (*das sollen*) sertipikat tanah elektronik merupakan bagian dari layanan elektronik yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu hak tanggungan elektronik, pengecekan sertipikat, zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah secara elektronik. Kondisi empiris atau fakta di lapangan (*das sein*) bahwa kebijakan ini menuai pro dan kontra. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah; Pertama, bagaimana peran Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah pada penerbitan sertipikat tanah elektronik ? Kedua, Bagaimana kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat tanah elektronik ? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif atau disebut juga metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Guna mendukung dan memperkuat penelitian, Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti akademisi, petugas Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat umum, dengan tujuan agar hasil penelitian lebih valid. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; Peran Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah pada penerbitan sertipikat tanah elektronik cukup antusias untuk men-sukseskan program sertipikat tanah elektronik dengan melakukan sosialisasi dan mengundang beberapa pihak yang terkait seperti Camat, Lurah dan PPAT dengan harapan melalui mereka dapat juga disampaikan sosialisasi informasi mengenai peralihan sertifikat tanah ke bentuk elektronik. Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan yaitu melalui media sosial seperti *instagram*, *tik-tok* dan *facebook*. Saran dari penulis ialah; jika registrasi yang dilakukan telah sesuai maka hak yang dimiliki dapat mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perlindungan tersebut harus dibarengi dengan diwujudkannya tujuan hukum yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat dan tentunya hukum harus didasarkan pada sebuah keadilan.

A B S T R A C T

Name	:	Muhammad Syahrul Ramadhan
I.D Number	:	2110611329
Thesis Title	:	Implementation of Electronic Certificate Issuance in Land Title Granting to Ensure Legal Certainty
Keyword	:	Electronic Land Certificate
Page	:	i-xii + 88

Content of Abstract :

A land certificate is a document that proves ownership rights to land as the final product of the land registration process. Any transfer of land rights through sale and purchase can only be registered if the legal act of transferring land rights is stated in a deed made by the Land Deed Official. The Indonesian government has taken a strategic step by initiating the transition of land title certificates from physical analog form to electronic form. Normatively (das sollen) electronic land certificates are part of the electronic services that have been issued previously, namely electronic mortgage rights, certificate checking, land value zones, and electronic land registration certificates. Empirical conditions or facts on the ground (das sein) that this policy has pros and cons. The problems that will be discussed in this study are; First, what is the role of the National Land Agency's Agrarian and Spatial Planning Office in land registration in the issuance of electronic land certificates? Second, what is the legal certainty for electronic land certificate holders? The research method used in compiling this thesis is normative legal research or also called the normative legal research method. The normative legal research method is library legal research which is carried out by examining library materials or secondary data alone. In order to support and strengthen the research, the author also conducted interviews with related parties, such as academics, National Land Agency officers and the general public, with the aim of making the research results more valid. The results of this study conclude that; The role of the National Land Agency's Agrarian and Spatial Planning Office in land registration in the issuance of electronic land certificates is quite enthusiastic in making the electronic land certificate program a success by conducting socialization and inviting several related parties such as Sub-district Heads, Village Heads and PPATs with the hope that through them, socialization of information regarding the transition of land certificates to electronic form can also be conveyed. Another form of socialization that is carried out is through social media such as Instagram, TikTok and Facebook. The author's suggestion is that if the registration is carried out properly, the rights held can receive legal protection. This protection must be accompanied by the realization of the objectives of the law, namely ensuring legal certainty in society and of course the law must be based on justice.